

DINAMIKA POLITIK ISLAM DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Mohamad Saleh Refra^{1*}, Ismed Kelibay², Suranto Eko Widodo³, Irwan Boinauw⁴, Rahma Rahakbauw⁵

^{1,2,4}Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

³Prodi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Marta. Indonesia

⁵Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

*Korespondensi: Salehrefra7@gmail.com

Citation (APA):

Refra, M. S., Kelibay, I., Widodo, S. E., Boinauw, I., & Rahakbauw, R. (2025). Dinamika Politik Islam dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 374–384. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4946>

Email Authors:

Salehrefra7@gmail.com
ismed92@um-sorong.ac.id
eko.binaamarta@gmail.com
imm.irwan321@gmail.com
rahmarahakbauw@gmail.com

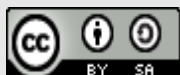
Submitted: 24 September, 2025

Accepted: 15 Oktober, 2025

Published: 15 November 2025

Copyright (c) 2025 Mohamad Saleh Refra, Ismed Kelibay, Suranto Eko Widodo, Irwan Boinauw

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Studi ini mengkaji dinamika politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim yang konsisten menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan memahami arah transformasi politik Islam di tengah tantangan modernitas, pluralisme, dan rasionalitas politik kontemporer. Berlandaskan teori *pragmatisme politik* Islam oleh Oliver Roy, studi ini berasumsi bahwa kegagalan politik Islam menghadapi realitas modern bukan merupakan kehancuran ideologi, melainkan proses adaptasi menuju bentuk yang lebih pragmatis dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, melalui analisis literatur akademik seperti artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa politik Islam di Indonesia mengalami proses pragmatisasi, ditandai dengan orientasi strategis yang inklusif, adaptif, dan berbasis isu universal, seperti keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan. Pendekatan ini menjaga relevansi politik Islam dalam masyarakat multikultural. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pemahaman terhadap transformasi politik Islam menjadi krusial bagi perumusan kebijakan publik yang inklusif, demokratis, dan mampu mengakomodasi aspirasi keagamaan, tanpa memicu polarisasi identitas, serta memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Islam; Dinamika; Demokrasi Indonesia

ABSTRACT

This study examines the dynamics of Islamic politics within Indonesia's democratic system, a country with a Muslim-majority population that consistently upholds democratic principles. The research aims to understand the direction of Islamic political transformation amid the challenges of modernity, pluralism, and contemporary political rationality. Grounded in Oliver Roy's theory of Islamic political pragmatism, this study assumes that the failure of political Islam to confront modern realities does not signify the collapse of its ideology, but rather reflects a process of adaptation toward a more pragmatic and contextual form. This research employs a qualitative method with a library research approach, analyzing academic literature such as journal articles relevant to the topic. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Islamic politics in Indonesia has undergone a pragmatization process, characterized by inclusive, adaptive, and issue-based strategic orientations focusing on universal values such as social justice, democracy, and welfare. This approach sustains the relevance of Islamic politics in a multicultural society. Consequently, understanding the transformation of Islamic politics is crucial for formulating inclusive and democratic public policies that can accommodate religious aspirations without provoking identity polarization, thereby strengthening substantive democracy in Indonesia.

Keywords: Islamic Politics; Dynamics; Indonesian Democracy

PENDAHULUAN

Studi ini menyoroti dinamika politik Islam dalam perjalanan demokrasi di Indonesia yang memiliki sejarah politik yang panjang dan kompleks sejak masa kemerdekaan. Perjalanan demokrasi Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika ideologi dan sistem pemerintahan, tetapi juga oleh peran umat

Islam sebagai kekuatan sosial-politik yang signifikan dalam membentuk arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat setidaknya dua pandangan utama dalam politik Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Karim (1997). Pertama, pandangan yang menekankan pentingnya pranata formal sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai Islam, baik melalui pembentukan lembaga sosial-politik Islam, penerapan sistem ekonomi Islam, maupun upaya menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara. Namun, berbagai usaha untuk menginstitutionalisasi Islam dalam bentuk ideologi politik formal di Indonesia tidak pernah mencapai keberhasilan yang nyata. Kedua, pandangan yang menilai bahwa aktualisasi Islam tidak harus diwujudkan melalui pranata formal, melainkan dapat direalisasikan melalui praksis sosial, budaya, dan politik, yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Pandangan ini menegaskan, bahwa substansi Islam dapat hidup dan berkembang dalam ruang publik demokratis, tanpa harus menjadi ideologi negara, di mana hal itu sejalan dengan prinsip inklusivitas dan pluralitas masyarakat Indonesia.

Penelitian ini disandarkan pada argument, bahwa pada masa Orde Baru, politik Islam dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Melalui kebijakan “Depolitisasi Islam” (Effendy, 2000), pemerintah memaksa seluruh partai politik dan ormas untuk berasaskan Pancasila. Kebijakan ini membatasi gerak politik Islam, tetapi sekaligus mendorong lahirnya apa yang disebut sebagai *Islam Kultural* (Al-Fajri, 2007), yaitu proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial tanpa campur tangan negara.

Reformasi 1998 menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk kembali berperan dalam ranah politik. Lengsernya Orde Baru membuka peluang lahirnya berbagai partai politik, termasuk partai-partai Islam. Sebelum Pemilu 1999, tercatat 181 partai berdiri, dengan 42 di antaranya berbasis Islam. Namun setelah proses seleksi, hanya 20 partai Islam yang berhak mengikuti pemilu (Evans, 2003). Meskipun demikian, keberadaan partai-partai Islam ini menunjukkan kebangkitan aspirasi politik umat Islam setelah puluhan tahun ditekan.

Era reformasi juga ditandai dengan berkembangnya wacana modernisasi Islam (*Islamic Modernism*), yakni upaya mentransformasikan ajaran Islam agar relevan dengan tuntutan kehidupan modern (Nashir, 2013; Maarif, 2001). Melalui pendekatan ini, politik Islam berusaha bersinergi dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta pembangunan nasional. Dalam perkembangan pasca reformasi, partai politik Islam terus hadir dalam setiap pemilu. Mulai dari Pemilu yang berlangsung pada tahun 1999 hingga tahun 2024, keberadaan partai Islam, seperti PPP, PAN, PKB, PK (yang beralih fungsi menjadi PKS), PBB, hingga Partai Ummat sebagai pendatang baru, memperlihatkan konsistensi peran politik Islam di Indonesia. Meskipun perolehan suara tidak pernah dominan, partai-partai Islam tetap menjadi bagian penting dari sistem multipartai Indonesia, baik dalam koalisi pemerintahan maupun sebagai oposisi.

Secara historis, dinamika politik Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan organisasi sosial-keagamaan. Sejak awal abad ke-20, berdirinya Serikat Dagang Islam (SDI), Muhammadiyah (1912), dan Nahdlatul Ulama (1926), telah memberi kontribusi besar terhadap pembentukan identitas politik umat Islam (Fikruzzaman & Ankesa, 2022). Organisasi-organisasi ini tidak hanya berperan dalam bidang dakwah dan pendidikan, tetapi juga menjadi basis kultural yang menopang partisipasi politik umat Islam hingga kini.

Dengan demikian, dinamika politik Islam dalam demokrasi Indonesia merupakan hasil dari interaksi panjang antara faktor historis, sosiologis, dan politis. Perjalanan ini memperlihatkan bahwa Islam di Indonesia mampu beradaptasi dengan sistem demokrasi modern tanpa kehilangan akar tradisi keislamannya, sekaligus menegaskan pentingnya politik Islam dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi keagamaan dan prinsip kebangsaan. Studi ini mengembangkan kerangka sintesis antara konsep Islam kultural dan politik pragmatisme, untuk menjelaskan variasi taktik partai-partai Islam dalam sistem demokrasi Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna di balik tindakan, peristiwa, atau interaksi sosial dari perspektif subjek yang diteliti (Sugiyono, 2022). Selain itu, dalam proses riset kepustakaan, penulis mengumpulkan artikel dari basis data jurnal dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "Politik Islam, Demokrasi Indonesia, Dinamika Politik Islam, dan Partai Politik Islam".

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dari berbagai literatur akademik yang relevan, melalui kegiatan membaca, mencatat, dan menganalisis temuan-temuan penelitian yang relevan dengan topik. Secara khusus, sumber data penelitian ini berfokus pada bahan-bahan dokumen, seperti artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian, sebagai rujukan dari literatur sebelumnya. Sumber-sumber ini kemudian dimanfaatkan penulis untuk mengkaji transformasi politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur akademik yang relevan dengan topik kajian. Proses ini mencakup kegiatan membaca secara mendalam, mencatat temuan-temuan penting, serta menganalisis berbagai hasil penelitian yang memiliki keterkaitan konseptual dan empiris dengan tema politik Islam dan demokrasi (Zed, 2014). Secara khusus, sumber data penelitian difokuskan pada dokumen tertulis berupa artikel jurnal ilmiah dan publikasi akademik lainnya yang kredibel. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansinya terhadap isu dinamika politik Islam dalam konteks demokrasi Indonesia (Sugiyono, 2022).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menekankan interpretasi mendalam terhadap gagasan, argumen, dinamika, dan transformasi yang berkembang dalam literatur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dinamika, transformasi, kecenderungan pragmatisme, serta strategi adaptif politik Islam di Indonesia dalam konteks sosial-politik kontemporer (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menerapkan tiga langkah analisis untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan, yaitu: reduksi data, di mana peneliti merangkum informasi dengan memilih pokok-pokok utama atau tema yang relevan dengan dinamika politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia; penyajian data, yaitu dilakukan dengan mengorganisasi, serta menampilkan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur; dan penarikan kesimpulan, yakni merujuk pada hasil dan temuan penelitian mengenai dinamika politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 86,8% dari total 279 juta jiwa (BPS, 2023). Fakta demografis ini menjadikan umat Islam sebagai kekuatan sosial dan

politik utama yang tidak dapat diabaikan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurut Hafner (2000), umat Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menyelaraskan ajaran agama dengan budaya demokrasi. Hal ini tampak dari kemampuan umat Islam untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, tidak hanya pada level prosedural, tetapi juga pada aspek fundamental, seperti ideologi pluralisme, toleransi, dan modal sosial (Ramage, 1996; Mujani, 2003). Dengan demikian, keterlibatan umat Islam dalam politik nasional lebih menekankan prinsip kebangsaan dan keadilan sosial, ketimbang semata-mata memperjuangkan identitas keagamaan.

Dinamika Politik Islam

Politik Islam di Indonesia menunjukkan karakter yang lebih akomodatif terhadap demokrasi, dengan menjadikan ideologi Pancasila sebagai dasar konsensus nasional. Orientasi ini tampak dari dominasi partai-partai nasionalis dalam setiap kontestasi pemilu, meskipun elite dan konstituen Muslim memainkan peran penting dalam proses politik tersebut (Dewi & Sholahuddin, 2020). Fenomena ini mengindikasikan, bahwa dinamika politik Islam di Indonesia mengalami proses pragmatisasi, di mana nilai-nilai keislaman telah diartikulasikan melalui kerangka kebangsaan dan demokrasi, bukan melalui formalisasi syariat. Pola ini memperlihatkan kemampuan adaptif politik Islam terhadap sistem politik modern yang pluralistik dan demokratis, sekaligus menegaskan posisi Islam sebagai kekuatan moral dan sosial, serta konstruktif dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Mujani (2003) menunjukkan, bahwa Islam dapat dipahami melalui empat dimensi, yaitu perangkat ritual, jaringan keterlibatan sipil, identitas sosial, dan orientasi politik (Islamisme). Dari dimensi tersebut, Islam tidak memiliki hubungan negatif dengan demokrasi, kecuali dalam hal toleransi antara umat beragama di Indonesia. Namun, Islamisme yang intoleran tidak menjadi ancaman serius bagi stabilitas demokrasi, karena kelompok ini cenderung pasif dalam aktivitas politik, bukan aktor protes yang dapat mengguncang sistem demokrasi. Temuan ini diperkuat oleh studi terbaru yang menegaskan, bahwa umat Islam Indonesia lebih mengedepankan demokrasi substantif ketimbang narasi eksklusif, terutama setelah era Reformasi (Aspinall & Mietzner, 2019; Pepinsky, 2022).

Dalam konteks organisasi politik, partai politik Islam memiliki sejarah panjang dan memainkan peran penting dalam dinamika politik Indonesia. Melalui perspektif strategi dan komunikasi politik, partai-partai Islam dapat dipahami sebagai institusi yang berfungsi mengorganisasi kepentingan umat sekaligus beradaptasi dengan sistem demokrasi modern (Romli, 2013). Kehadiran partai-partai Islam bukanlah fenomena baru, sebab gagasan politik Islam telah muncul bahkan sebelum berdirinya Partai Masyumi pada tahun 1945. Sejak awal abad ke-20, Islam menjadi salah satu pelopor perjuangan politik pribumi dalam menegaskan identitas dan melawan dominasi kolonial (Kusmanto & Warjio, 2018).

Menurut Effendy (2009), terdapat dua spektrum utama dalam pemikiran politik Islam di Indonesia. Pertama, spektrum yang menekankan, bahwa Islam harus menjadi dasar dalam bernegara; syari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara karena kedaulatan politik dianggap berada di tangan Tuhan. Kelompok ini beranggapan, bahwa konsep *nation-state* tidak sejalan dengan ide *ummah* yang universal, sementara prinsip *shura* (musyawarah) memiliki perbedaan penerapan dengan demokrasi modern. Kedua, spektrum yang berpendapat, bahwa Islam tidak menyediakan pola baku tentang teori negara, sebab Al-Qur'an bukanlah kitab politik, dan istilah *dawlah* dalam pengertian sistem politik tidak ditemukan secara eksplisit.

Spektrum pemikiran tersebut hingga kini masih mewarnai dinamika politik Islam di Indonesia. Di

satu sisi, ada kelompok yang terus memperjuangkan syari'ah sebagai dasar negara, sementara di sisi lain ada kelompok yang lebih akomodatif terhadap demokrasi Pancasila. Dinamika ini mencerminkan pluralitas orientasi politik umat Islam, sekaligus menjadi kekhasan politik Islam Indonesia yang relatif berbeda dari model di Timur Tengah (Fealy & Bush, 2014; Mietzner, 2020).

Komunikasi Politik Islam

Partai politik Islam memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik Indonesia dan menjadi kajian penting yang dapat dianalisis melalui perspektif strategi dan komunikasi politik. Komunikasi sendiri pada dasarnya merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam suatu organisasi, baik melalui jaringan formal maupun informal (Romli, 2013). Dalam konteks ini, partai politik Islam dapat dipahami sebagai organisasi modern dengan struktur yang memiliki organ-organ internal yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan politik bersama.

Politik Islam di Indonesia sesungguhnya telah muncul jauh sebelum berdirinya Masyumi, karena Islam telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat pribumi sekaligus motor penggerak perjuangan politik sejak masa kolonial (Kusmanto & Warjio, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa peran Islam dalam komunikasi politik tidak hanya sebatas pada institusi formal partai politik, tetapi juga berakar pada kesadaran historis dan kultural umat Islam di Indonesia. Menurut Fikruzzaman & Ankesa (2022), terdapat dua fenomena utama dalam komunikasi politik Islam di Indonesia. Pertama, fenomena komunikasi politik dalam sistem politik, di mana elite yang berada pada ranah struktur eksekutif maupun legislatif berperan dalam mengolah aspirasi publik menjadi produk kebijakan. Aspirasi tersebut datang dari berbagai kanal infrastruktur politik, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi non-pemerintah (NGOs), organisasi massa (ormas), media massa, maupun kelompok kepentingan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi politik Islam tidak bersifat linier, melainkan berlangsung dalam interaksi antara struktur negara dan kekuatan masyarakat sipil (*civil society*).

Kedua, fenomena komunikasi politik dalam kampanye, di mana para elite politik, baik yang sedang menjabat, pernah menjabat, maupun calon baru, senantiasa berusaha memengaruhi kelompok sosial, tertentu demi memperoleh dukungan publik. Strategi kampanye tersebut menggabungkan pendekatan interpersonal dengan pemanfaatan media massa. Sebagaimana dikemukakan Lachapelle (2005), proses komunikasi politik selalu bertumpu pada dua hal: pengaruh interpersonal dan strategi kampanye yang didistribusikan melalui media. Dengan demikian, komunikasi politik Islam di Indonesia beroperasi pada dua level: *grassroots* (tatap muka, jaringan keagamaan, pengajian, pesantren, ormas) dan level media (iklan, debat politik, konten digital).

Pasca Orde Baru, dinamika komunikasi politik Islam mengalami perubahan mendasar. Negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam menentukan arah politik nasional. Sebaliknya, kekuatan non-negara, baik *civil society* maupun *political society*, semakin mendapatkan legitimasi dan reputasi dalam proses demokratisasi (Lay, 2006). Kondisi ini menggeser pola komunikasi politik Islam dari model top-down yang dikontrol negara menjadi model yang lebih horizontal, partisipatif, dan berbasis jaringan masyarakat.

Lebih jauh, perkembangan era digital juga memberikan ruang baru bagi partai politik Islam dalam mengembangkan strategi komunikasi. Penelitian terbaru menunjukkan, bahwa partai Islam, semakin aktif memanfaatkan media sosial untuk memperluas basis dukungan dan membangun citra politik, terutama di kalangan pemilih muda (Nurdin & Rizki, 2021; Al-Anshori, 2023). Sementara itu, literatur lain

menyoroti, bahwa politik identitas berbasis agama tetap menjadi salah satu strategi komunikasi, meskipun dalam kerangka demokrasi Indonesia yang plural, strategi tersebut harus dikombinasikan dengan isu-isu kebangsaan agar dapat diterima secara luas (Mietzner, 2019; Pepinsky, 2020). Oleh karena itu, fenomena komunikasi politik Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai proses yang terus bertransformasi. Dari fase awal sebagai gerakan identitas, lalu mengalami pembatasan di masa Orde Baru, hingga kini berkembang sebagai strategi politik yang adaptif dalam sistem demokrasi. Partai politik Islam tidak hanya menggunakan pendekatan kultural dan interpersonal, tetapi juga mengintegrasikan media massa dan media digital sebagai instrumen komunikasi politik modern.

Transformasi Politik Islam

Prinsip utama politik Islam adalah menyadarkan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam, serta menghadirkannya dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh sebab itu, politik Islam tidak hanya dipahami sebagai upaya merebut kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan etika, moral, dan cita-cita Islam dalam tata kelola negara. Jejak Islam dalam politik di Indonesia sebenarnya telah muncul sejak akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14 (Effendy, 2009). Pada periode tersebut, Islam hadir dalam dialog sosial, kultural, dan politik di tingkat lokal, meskipun diskursusnya masih terbatas dan belum sistematis.

Strategi politik Islam di Indonesia tidak hanya diarahkan untuk memenangkan pemilu atau memperoleh kursi kekuasaan, tetapi juga berorientasi pada transformasi sistem sekuler ke arah sistem yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Artinya, perjuangan politik Islam bukan sekadar pragmatis, melainkan juga normatif dengan visi membangun masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera berdasarkan prinsip keislaman (Madjid, 1992; Baswedan, 2004). Keberhasilan strategi tersebut sangat dipengaruhi oleh interaksi antara elite partai, kader, dan masyarakat luas, yang menentukan sejauh mana ideologi partai Islam dapat diterima secara inklusif di tengah masyarakat multikultural Indonesia (Mujani & Liddle, 2009).

Dalam perkembangan global, setidaknya ada tiga gerakan Islam yang mewarnai strategi politik, yaitu revivalisme, reformisme, dan fundamentalisme. Ketiga pola tersebut muncul sebagai reaksi terhadap ekspansi kolonial Barat pada abad ke-18 dan ke-19 (Nashir, 2013). Revivalisme berupaya menghidupkan kembali kemurnian Islam, namun ketika tidak berhasil mencapai tujuan jangka panjang, ia bergeser ke arah reformisme yang berkoalisi dengan gerakan nasionalis. Setelah reformisme menghadapi tantangan, muncul fundamentalisme sebagai upaya mempertahankan identitas Islam secara ketat dalam menghadapi dominasi Barat.

Perkembangan politik Islam di Indonesia pada era modern merefleksikan proses transformasi dari gerakan sederhana menuju arah yang lebih kompleks. Menurut Rosana (2011), transformasi ini merupakan bagian dari modernisasi pemikiran Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini juga sejalan dengan gagasan Barton (1999) tentang *Neo-Modernisme Islam*, yakni upaya mengintegrasikan Islam dengan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Munawir Sjadzali menegaskan, bahwa setidaknya ada tiga faktor munculnya politik Islam modern: (1) kemunduran internal dunia Islam, (2) penetrasi kolonialisme Barat, dan (3) superioritas ilmu pengetahuan serta teknologi Barat yang mendorong lahirnya gerakan pembaruan (Butarbutar dkk., 2022).

Wacana politik Islam di Indonesia juga diperkaya oleh tokoh-tokoh besar. Nurcholish Madjid

dengan gagasan modernisasi, sekularisasi, dan pluralisme; Abdurrahman Wahid dengan konsep *pribumisasi Islam*; Munawir Sjadzali dengan reaktualisasi; M. Dawam Rahardjo dengan ekonomi Islam; Jalaluddin Rakhmat dengan Islam alternatif; Kuntowijoyo dengan Islam transformatif; serta Ahmad Syafi'i Ma'arif dengan gagasan Islam kebangsaan. Sementara itu, generasi muda intelektual seperti Azyumardi Azra, Bahtiar Effendy, Komaruddin Hidayat, Fachry Ali, Haidar Bagir, Ihsan Ali-Fauzi, dan Masdar Farid Mas'udi turut membentuk arus baru pemikiran Islam yang relevan dengan konteks demokrasi Indonesia (Mulia, 2018; Azra, 2019).

Inklusivitas Politik Islam

Politik Islam cenderung mengadopsi pendekatan politik yang lebih inklusif, hal tersebut tidak hanya membantu partai dalam mendapatkan dukungan yang lebih besar dan luas, tetapi juga dapat mewujudkan visi dan misi partai yang lebih komprehensif bagi masyarakat secara luas. Terdapat tiga faktor utama yang mendorong politik Islam mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif: (1) Tekanan Pemilih Moderat, untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas, partai politik Islam perlu menjangkau basis pemilih yang heterogen, termasuk pemilih non-Muslim atau Muslim moderat. Hal tersebut mendorong partai politik Islam untuk beralih dari pendekatan eksklusif dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, agar dapat menarik perhatian pemilih moderat yang sering kali menjadi mayoritas dalam pemilihan umum (Ahnaf, 2016). (2) Koalisi dalam Pemerintahan, proses koalisi menjadi salah satu strategi yang sangat penting terkait dengan ragam tujuannya (Addiansyah, 2019). Dalam sistem politik yang multipartai, partai politik Islam seringkali berkoalisi dengan partai lain untuk membentuk pemerintahan yang efektif, dengan strategi yang lebih inklusif, guna menyatukan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang sama (Ambardi, 2009; Winter & Dumont, 2006). (3) Tekanan Politik Elektoral, tekanan elektoral memicu terjadinya perubahan yang dilakukan dalam internal politik partai Islam, di mana kepemimpinan atau tekanan dari dalam partai itu sendiri dapat mendorong perubahan ideologi, dan strategi pada dinamika internal, serta perubahan politik dengan mendorong partai untuk mengadopsi strategi yang lebih inklusif, agar meningkatkan daya tarik elektoral, serta mendapat dukungan lebih besar dari semua kalangan.

Dalam konteks politik kontemporer, strategi politik Islam di Indonesia mulai menunjukkan kecenderungan pragmatis dan inklusif. Partai-partai Islam tidak lagi menekankan simbol formalisasi syariat Islam, melainkan lebih fokus pada isu kesejahteraan, keadilan sosial, antikorupsi, serta penguatan demokrasi. Fenomena ini sejalan dengan teori *pragmatisme politik Islam* yang dikemukakan Roy (1994), bahwa setelah Islam politik mengalami kegagalan ideologis, banyak gerakan Islam mulai berubah menjadi aktor politik yang lebih pragmatis, moderatis, dan inklusif. Mereka mulai berkompromi dengan demokrasi, mengadopsi sistem parlementer, dan bahkan ikut berpartisipasi dalam pemilu. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa partai-partai Islam, seperti PKS, PAN, dan PKB, lebih menekankan strategi koalisi, serta perluasan basis dukungan lintas agama sebagai respons terhadap realitas politik elektoral di Indonesia pasca-Reformasi (Fealy, 2020; Hamayotsu, 2011).

Transformasi politik Islam di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang interaksi antara ajaran Islam, realitas sosial-budaya lokal, dan dinamika politik demokratis. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kekuatan politik umat Islam tidak dapat dipisahkan dari proses demokratisasi nasional. Sejarah menunjukkan bahwa Islam di Indonesia mampu beradaptasi dengan demokrasi, tidak hanya pada level prosedural, tetapi juga dalam prinsip-prinsip substantif, seperti pluralisme, toleransi, dan partisipasi politik. Dengan demikian, strategi politik Islam di Indonesia merupakan hasil dialektika

panjang antara tradisi keislaman, dinamika politik nasional, serta arus globalisasi. Tidak hanya berkuat pada perebutan kekuasaan, tetapi juga pada upaya meneguhkan Islam sebagai etika publik yang relevan dengan prinsip demokrasi, pluralisme, dan modernitas.

SIMPULAN

Transformasi pemikiran politik Islam yang terbagi antara arus formalisasi syariat dan penerimaan terhadap demokrasi Pancasila merepresentasikan pluralitas orientasi umat Islam. Ciri ini menjadi kekhasan politik Islam Indonesia yang berbeda dari model Timur Tengah. Partai politik Islam pun terus bertransformasi, dari gerakan identitas yang terikat simbol syariat, menuju strategi pragmatis dan inklusif, yang menekankan isu-isu universal, seperti kesejahteraan, keadilan sosial, antikorupsi, serta penguatan demokrasi. Perkembangan komunikasi politik turut menjadi penanda penting dalam transformasi ini. Jika pada masa Orde Baru, pola komunikasi Islam bersifat *top-down* dan terkendali, pasca-Reformasi, dan berkembang menjadi lebih horizontal, partisipatif, serta berbasis jaringan masyarakat sipil. Pemanfaatan media digital semakin memperluas ruang interaksi politik Islam, terutama dalam meraih dukungan generasi muda.

Temuan ini memperkaya kajian politik Islam dengan memperlihatkan varian khas Indonesia yang tidak hanya dipengaruhi oleh ideologi, tetapi juga oleh konteks demokrasi dan pluralisme. Pergeseran orientasi dari simbolisme ke isu substantif juga menguatkan relevansi teori *pragmatisme politik Islam* dalam memahami politik Islam kontemporer. Lebih jauh, integrasi strategi komunikasi politik Islam ke dalam kerangka demokrasi modern memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi politik yang berbasis pada nilai agama dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, politik Islam di Indonesia tidak hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan, melainkan juga menjadi sarana untuk meneguhkan etika publik yang sejalan dengan demokrasi, pluralisme, dan modernitas. Inklusivitas, pragmatisme, dan adaptabilitas menjadi ciri utama transformasi politik Islam Indonesia, yang menjadikannya relevan dalam dinamika politik global, sekaligus kontekstual dengan realitas masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memberi beberapa pelajaran penting. Pertama, bagi partai politik Islam, strategi adaptif yang menyeimbangkan identitas keagamaan dengan isu-isu universal, menjadi kunci untuk tetap relevan dalam lanskap politik multikultural. Kedua, bagi pembuat kebijakan, pemahaman terhadap transformasi politik Islam dapat menjadi rujukan dalam membangun regulasi yang inklusif dan menjaga kohesi sosial. Ketiga, bagi masyarakat sipil dan akademisi, hasil kajian ini mendorong pentingnya literasi politik Islam yang demokratis, sehingga dapat memperkuat partisipasi publik yang rasional, kritis, dan tidak terjebak pada polarisasi identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Addiansyah, Nur Rofik, M. (2019). Koalisi Partai Politik Islam Pada Pilpres 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis. *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam*. Vol. 2 (2) Hal. 189-198. <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v2i2.6016>
- Al-Fajri, A. (2007). Delima Islam kultural. *Jurnal Politik Islam*, 2, 38. Laboratorium Politik Islam (LPI), Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN: Jakarta
- Al-Anshori, M. (2023). *Media Sosial dan Strategi Politik Partai Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.
- Ahnaf, I. M. (2016). Tiga Jalan Islam Politik di Indonesia: Reformasi, Refolusi dan Revolusi. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), 127-1140.

<http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.728>

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia*. Journal of Democracy.
- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel*. KPG: Jakarta.
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Prenada Media: Jakarta.
- Azra, A. (2019). *Islam, Politik, dan Demokrasi di Asia Tenggara: Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Komparatif*. Mizan: Jakarta.
- Baswedan, A. (2004). *Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory*. Asian Survey, 44(5).
- Barton, Greg. (1999). *Gagasan Islam Liberal*. Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Majid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980. Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara: Jakarta.
- Bayat, A. (2007). *Making Islam democratic: Social movements and the post-Islamist turn*. Stanford University Press.
- Bayat, A. (2013). *Post-Islamism: The changing faces of political Islam*. Oxford University Press.
- BPS. (2023). *Statistik Indonesia 2023*.
- Butarbutar, M. Z., Damanik, K., & Marzuki. (2022). Menilik Perkembangan Pemikiran Politik Islam Masa Modern (Sebuah Pembacaan Awal). *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(4), 6-10. <https://doi.org/10.57251/hij.v1i4.451>
- Dewi, N. R., & Sholahuddin, A. (2020). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Menjawab Tantangan Multikultural di Indonesia: Studi Kasus Papua. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 3(1), 61-72. <https://doi.org/10.21043/politea.v3i1.7255>
- Evans, R. K. (2003). *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Arsie, Consultancies: Jakarta.
- Effendy, B. (2000). *Politisasi Islam. Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik*. Cet. I, Hal. 108. Mizan Media Utama: Bandung.
- Effendy, B. (2009). "Islam dan Negara Transformasi Gagasan Islam dan Praktik Politik Islam di Indonesia". Yayasan Abad Demokrasi: Jakarta.
- Fealy, G., & Bush, R. (2014). *The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma, and Democracy*. Asian Journal of Social Science.
- Fealy, G. (2020). *Islam and Politics in Indonesia: The Limits of Inclusivity*.
- Fikruzzaman, D., & Ankesa, H. (2022). KOMUNIKASI POLITIK PARTAI ISLAM MENJELANG PEMILU. *Tabayyun*, 3(1), 35-46. <https://mail.ejournal-stidkibogor.ac.id/index.php/tabayyun/article/view/23>
- Hamayotsu, K. (2011). *The rise of the Prosperous Justice Party in post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of Islamist Mobilization in a Muslim Democracy*. Asian Survey, 51(5), 971-992. 10.1525/as.2011.51.5.971
- Hefner, R. W. (2024) *Islam and Citizenship in Indonesia: Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics*. London & New York. <https://doi.org/10.4324/9781032629155>

- Karim, G. A. (1997). *Islaam Di Panggung Politik Indonesia*. JSP: Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Vol (2) Hal. 41-55. <https://doi.org/10.22146/jsp.11173>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2018). *Model Politik Pembangunan Organisasi Kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan Al Washliyah di Kota Medan*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6(2), 142-155. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.2008>
- Lay, C. (2006). *Involusi Politik: Esai-Esai Transisi Indonesia*. PLOD: Yogyakarta.
- Majid, N. (1992). *Islam, Modern, dan Keindonesiaan*. Mizan Pustaka: Bandung.
- Maarif, A. S. (2001). "Pertimbangkan Dampak yang Akan Timbul". dalam Kuriawan Zein dan Sarifuddin. Editor. *Syariat Islam Yes. Syariat Islam No*. Hal. 41-44. Paramadina: Jakarta.
- Mietzner, M. (2019). *Islam, Identity, and Electoral Politics in Indonesia*. Journal of Current Southeast Asian Affairs.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Mujani, S. (2003). "Religios Democrats: Democtaric Culture and Muslim Political Participation in post-Suharto Indonesia". Unpublished PhD dissertation. The Ohio State University.
- Mujani, S., & Liddle, William R. (2009). "Muslim Indonesia's Secular Democracy." *Asian Survey*, 49(4), 575-590. <https://doi.org/10.1525/as.2009.49.4.575>.
- Mulia, M. (2018). *Islam Dan Transformasi Sosial Dalam Perspektif Kuntowijoyo*. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 3(2), 117-130. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/441/227>
- Nasir, H. (2013). *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Cet. I. Rajab 1434 H/Mei 2013. Mizan Pustaka: Bandung.
- Nurdin, A. & Rizki, M. (2021). *Digital Political Communication of Islamic Parties in Indonesia*. Jurnal Komunikasi.
- Pepinsky, T. (2020). *Pluralism and Democracy in Indonesia: The Political Role of Religion*. Asian Survey.
- Romli, Lili. (2013). "Crescent and Electoral Strength: Islamic Party Portrait of Reform Era in Indonesia". *International Journal of Islamic Thought*, 4(1), 37-46. <https://doi.org/10.24035/ijit.04.2013.005>
- Rosana, E. (2011). *Modernisasi dan Perubahan Sosial*. Jurnal TAPIS.Vol.7.(1).Hal.3-47. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/srticle/view/1529/1269>
- Situmorang, E. (2018). *Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Mendukung Masyarakat Samosir Agar Lebih Maju Untuk Membantu Pemerintahan Kabupaten Samosir*. Hal. 2.IAIN: Padangsidimpuan.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Winter, L., & Dumont, P. (2006). *Parties in to Government: Still many Puzzless*, dalam Katz, Richard and William Crotty (Handoko o). Sage Publication: London.

PROFIL SINGKAT

Mohamad Saleh Refra, S. Sos., M.M., adalah penulis yang lahir di Desa Tamangil Nuhuten, Kota Tual, Kecamatan Key Besar Selatan, pada tanggal 30 Desember tahun 1974. Penulis menyelesaikan jenjang

Pendidikan Serjana (S1) pada Program Studi Administrasi Negara (STIA) Abdul Azis Kataloka Ambon, dan lulus pada tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan jenjang pendidikan (S2) pada Program Studi Magister Manajemen Pemerintahan di Universitas Teknologi Surabaya (UTS), dan lulus pada tahun 2014. Saat ini, penulis menjadi Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN), sejak tahun 2015–sekarang.